



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
KOTA KEDIRI TAHUN 2018 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) serta menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2019, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Kediri Tahun 2018 - 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA KEDIRI TAHUN 2018 - 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kediri.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Kediri Tahun 2018-2019.

#### Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

#### Pasal 3

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Pangan dan Gizi Sebagai Intervensi Pembangunan;
- b. Rencana Aksi Multisektor;
- c. Kerangka Pelaksanaan;
- d. Pemantauan dan Evaluasi.

#### Pasal 4

Rincian RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 1 Februari 2018

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 1 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA KEDIRI  
TAHUN 2018-2019

A. Pangan dan Gizi Sebagai Intervensi Pembangunan

1. Situasi Pangan dan Gizi

1.1. Situasi Pangan

UU No. 18 tahun 2012 menyatakan bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Tujuan penyelenggaraan pangan menurut UU No. 18 tahun 2012 adalah (1) meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri, (2) menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat, (3) mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (4) mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; (5) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; (6) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; (7) meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan (8) melindungi dan mengembangkan kekayaan sumberdaya Pangan nasional.

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu: 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan nasional. Penyediaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk, baik jumlah maupun mutunya merupakan harapan setiap upaya pemenuhan kebutuhan pangan.

Situasi ketersediaan energi total untuk dikonsumsi oleh penduduk Kota Kediri pada tahun 2015 sebesar 2.702 kkal/kap/hr sedangkan ketersediaan proteinnya mencapai 77 gr/kap/hr. Ketersediaan pangan baik sumber energi maupun protein standar yang dipersyaratkan dalam WNPG XI sebesar 2.400 kkal/kap/hr untuk ketersediaan energi dan 63 gr/kap/hr untuk ketersediaan protein.

Ketersediaan energi dari tahun ke tahun di Kota Kediri cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012 ketersediaan energi sebesar 3.367 kkal/kap/hr menurun menjadi 2.702 kkal/kap/hr pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh keragaman konsumsi pangan masyarakat yang tidak tergantung pada beras. Sehingga penyerapan bahan pangan local non beras semakin meningkat. Sedangkan kondisi ketersediaan energi nasional ideal sebesar 2.400 Kkal sehingga kondisi masyarakat Kota Kediri (2.702 KKal) masih belum memenuhi angka ideal. Sedangkan perubahan jumlah penduduk setiap tahunnya juga mempengaruhi ketersediaan energy pada tahun yang bersangkutan. Ketersediaan energi ini sendiri menurun mendekati angka ideal akan menjadi lebih baik.

Ketersediaan protein untuk dikonsumsi dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Jika dilihat pada tahun 2012 hingga tahun 2015 ketersediaan protein untuk dikonsumsi mengalami penurunan yang awalnya sebesar 109 gr/kap/hr pada tahun 2012 turun menjadi 77 gr/kap/hr pada tahun 2015. Jika dilihat dari sumber pangannya, rata-rata kontribusi pangan hewani terhadap ketersediaan protein selama kurun waktu 2012-2015 berada pada proporsi 21,80% sedangkan pangan nabati berkontribusi sebesar 78,30%. Tahun 2015, kontribusi pangan nabati terhadap ketersediaan protein Kota Kediri mencapai 77,9% dan kontribusi pangan hewani sebesar 22,1%.

Berdasarkan pedoman umum diversifikasi pangan yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional maka kelompok pangan yang dibutuhkan masyarakat meliputi: 1) padi-padian, 2) umbi-umbian, 3) pangan hewani, 4) kacang-kacangan. 5) sayur dan buah, 6) biji berminyak, 7) lemak dan minyak, 8) gula serta 9) kebutuhan lainnya seperti mineral.

Pada umumnya ketersediaan bahan pangan strategis di Kota Kediri mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari dua belas komoditas pangan strategis, komoditas jagung, kedelai, ubi jalar, daging, ikan mengalami kenaikan, sedangkan komoditas beras, ubi kayu dan gula

mengalami penurunan dan komoditas kacang tanah, kacang hijau, susu dan telur mengalami fluktuasi yang stabil.

Selanjutnya untuk konsumsi bahan pangan strategis Tahun 2016 di Kota Kediri bila dibandingkan dengan konsumsi tahun 2015, hampir semua komoditas mengalami peningkatan. Beberapa komoditas pangan yang mengalami peningkatan lebih dari 30% antara lain konsumsi : jagung, kedelai, kacang hijau, ubi jalar, dan gula. Sedangkan konsumsi komoditas yang mengalami penurunan adalah kacang tanah yakni 13,28%. Komoditas yang mengalami peningkatan konsumsi paling tinggi di tahun 2016 adalah konsumsi ubi jalar (55,59%) kemudian diikuti konsumsi jagung (39,08%). Komoditas yang mengalami kenaikan terendah adalah beras (0,45%) dan daging (4,73%).

Konsumsi bahan pangan terbesar yaitu pada komoditas pangan beras. Pada tahun 2016 konsumsi beras sebesar 24.988,5 Ton. Konsumsi paling sedikit yaitu pada komoditas kacang hijau yaitu 53,4 Ton. Dari data konsumsi dapat dilihat kecenderungan konsumsi masyarakat Kota Kediri yaitu pada komoditas beras, komoditas ini menjadi bahan pangan sumber karbohidrat masyarakat. Untuk mengurangi ketergantungan konsumsi bahan pangan pada beras telah dilakukan berbagai kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahan pangan sebagai sumber karbohidrat.

Jika dibandingkan dengan konsumsinya, komoditas pangan strategis yang dihasilkan oleh Kota Kediri mengalami surplus. Beras, jagung dan jagung merupakan komoditas yang surplusnya besar, sedangkan yang mengalami surplus terbesar di tahun 2016 adalah gula yaitu sebanyak 19.800,4 ton.

Aksesibilitas pangan menjelaskan mengenai kemampuan masyarakat mengakses pangan yang cukup, yang menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya ketahanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Pemerintahan pusat dan daerah baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat desa memiliki peran dalam memfasilitasi setiap orang dan rumah tangga di wilayahnya dapat mengakses pangan yang cukup setiap hari secara berkelanjutan, dan menghindarkannya dari kerawanan pangan.

Pengembangan akses pangan di tingkat individu dan rumah tangga melibatkan secara aktif peran pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Diperlukan upaya terpadu instansi terkait berupa penguatan modal usaha secara berkelompok, dukungan infrastruktur dan

keberpihakan pada kepentingan masyarakat, serta pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. Selanjutnya, kelompok diharapkan dapat menjadi wadah yang baik untuk proses penguatan ekonomi dan sosial.

Pemantapan akses pangan sebagai unsur yang penting dalam rangka pembangunan pangan dan gizi juga memerlukan peran masyarakat utamanya berkaitan dengan pencadangan pangan masyarakat. Pembangunan akses pangan diharapkan dapat mewujudkan kemampuan seseorang dalam rumah tangga secara periodik dapat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup melalui kombinasi cadangan pangan mereka dan hasil dari rumah/pekarangan sendiri, pembelian, barter, pemberian, pinjaman dan bantuan pangan.

Faktor lain yang mempengaruhi akses pangan masyarakat adalah aspek distribusi dan daya beli masyarakat. Aspek distribusi pangan berkaitan erat dengan aspek *supply side*. Aspek ini ditunjang infrastruktur wilayah seperti jalan, pasar, sarana dan prasarana transportasi darat maupun air. Selanjutnya, bagaimana jangkauan pasar dan daya beli masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan merupakan dua faktor utama berikutnya yang berpengaruh dalam kemampuan akses pangan masyarakat sedemikian hingga dapat dikonsumsi dengan cukup, berkualitas, dan aman.

Kualitas dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman ditunjukkan dengan tingkat skor pola pangan harapan (PPH). PPH atau *desirable dietary pattern* diperkenalkan pertama kali oleh FAO-RAPA dalam pertemuan konsultasi FAO-RAPA di Bangkok pada tahun 1989. PPH disarankan untuk digunakan bagi setiap negara dikawasan Asia Pasifik yang dalam penerapannya perlu diadaptasi sesuai pola konsumsi pangan dan kebutuhan gizi setempat.

PPH berguna (1) sebagai alat atau instrumen perencanaan konsumsi pangan, ketersediaan pangan dan produksi pangan; (2) sebagai instrumen evaluasi tingkat pencapaian konsumsi pangan, penyediaan pangan dan produksi pangan, baik penyediaan dan konsumsi pangan; (3) dapat pula digunakan sebagai basis pengukuran diversifikasi dan ketahanan pangan; (4) sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan pangan dan gizi.

PPH sebagai instrumen dan indikator penting dalam perencanaan pangan dan gizi di suatu wilayah diperlukan informasi tentang pola konsumsi energi dan konsumsi pangan anjuran dengan

mempertimbangkan (1) pola konsumsi pangan penduduk saat ini; (2) kebutuhan gizi yang dicerminkan oleh pola kebutuhan energi (asumsi: dengan makan anekaragam pangan, kebutuhan akan zat gizi lain akan terpenuhi); (3) mutu gizi makanan yang dicerminkan oleh kombinasi makanan yang mengandung protein hewani, sayur dan buah; (4) pertimbangan masalah gizi dan penyakit yang berhubungan dengan gizi; (5) kecenderungan permintaan (daya beli); (6) kemampuan penyediaan dalam konteks ekonomi dan wilayah.

Skor PPH yang rendah menunjukkan akses dan utilitas pangan yang cenderung rendah. Secara logis, akses pangan yang rendah dapat bersumber dari 2 (dua) hal utama yaitu ketersediaan pangan yang rendah dan atau daya beli yang rendah. Implikasi dari ketersediaan yang rendah dan daya beli yang rendah di sisi lain merupakan representasi dari tingkat ketahanan pangan yang rendah. Dengan kata lain, daerah tersebut mengalami rawan pangan.

Perlu juga disadari bahwa kerawanan pangan bersifat dinamis dan memiliki kecenderungan berfluktuasi antar waktu. Desa yang tahan pangan pada tahun ini bukan berarti bahwa desa tersebut juga akan tahan pangan pada tahun berikutnya. Dan terbukti bahwa desa yang rawan dengan bantuan pemerintah dapat menjadi tahan pangan melalui peningkatan akses wilayah dan juga program pemberdayaan lainnya.

Perhatian terhadap ketersediaan dan akses pangan merupakan *necessary condition* dalam pembangunan pangan dan gizi. Namun demikian, untuk mencapai output sumberdaya manusia yang hidup sehat dan produktif memerlukan makanan yang aman (*food safety*). Makanan dan minuman di Kota Kediri memerlukan pengawasan sehingga peredaran makanan tidak sehat, contohnya tingginya zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet. Jenis makanan tidak sehat ini akan sangat membahayakan bagi masyarakat terutama anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Kondisi keamanan pangan rendah akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 mensyaratkan bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab keseluruhan penyelenggaraan kegiatan baik pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi. Urutan penyebab masalah keamanan pangan

tersebut berturut-turut adalah: cemaran mikroba, BTP (Bahan Tambahan Pangan) pemanis berlebih, pewarna bukan untuk makanan. BTP pengawet (benzoat) berlebih, serta penyalahgunaan bahan berbahaya boraks dan formalin. Penyalahgunaan bahan berbahaya formalin telah dapat diturunkan kasusnya dari tahun ke tahun, demikian pula penggunaan BTP pemanis yang berlebihan. Sementara produk TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terkait dengan cemaran mikroba masih cukup dominan. Hal ini dapat merupakan indikasi kondisi higienitas dan sanitasi lingkungan yang perlu untuk ditingkatkan.

Pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting terus ditingkatkan cakupan dan intensitasnya. jenis produk yang diambil sampelnya difokuskan pada pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya seperti pewarna rhodamin B dan methanil yellow, boraks dan formalin. Selain itu, dilakukan monitoring terhadap penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas yang ditetapkan khususnya pengawet dan cemaran mikroba. Makanan sehat bagi anak sekolah akan membantu menyelamatkan generasi bangsa dari cemaran makanan berbahaya. Pencegahan ini akan berpengaruh positif pada usia produktif generasi bangsa.

Secara nasional produk pangan yang mengandung bahan berbahaya masih berfluktuasi di antara 10 persen sampai 13 persen, sedangkan produk yang mengandung bahan tambahan pangan berlebih juga berfluktuasi di sekitar 15 persen dan 30 persen. Masalah utama dari produk pangan jajanan anak sekolah nampaknya adalah cemaran mikroba. Intervensi untuk meningkatkan higienis dan sanitasi para penjaja pangan jajanan anak sekolah ini perlu dilakukan. Pemantauan garam konsumsi beryodium yang beredar di Kota Kediri dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif Tahun 2015, uji garam beryodium menunjukkan bahwa 90% Rumah Tangga dinyatakan memenuhi syarat.

## 1.2. Situasi Gizi

Berkaitan dengan kesadaran masyarakat tentang gizi, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan telah menjalankan program Desa Siaga dan salah satu agendanya adalah meningkatkan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI). Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan. Sedangkan, Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) adalah suatu keluarga yang

mampu mengenal, mencegah dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya. Suatu keluarga disebut KADARZI apabila telah berperilaku gizi yang baik yang dicirikan minimal dengan: (1) Menimbang berat badan secara teratur, (2) Memberikan Air Susu Ibu (ASI) saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan (ASI eksklusif), (3) Makan beraneka ragam, (4) Menggunakan garam beryodium, (5) Minum suplemen gizi sesuai anjuran.

## 2. Kebijakan Kota Kediri dalam Pembangunan Pangan dan Gizi

### 2.1. Kebijakan Terkait Konsumsi

Kebijakan dalam aspek konsumsi menjawab beberapa isu berkembang di Kota Kediri, yaitu antara lain:

- 1) Masih rendahnya keberagaman konsumsi pangan masyarakat.
- 2) Masih rendahnya perhatian terhadap aspek mutu pangan (sanitasi dan higienitas produk pangan olahan).
- 3) Belum optimalnya pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan yang bisa jadi sangat merugikan kesehatan bila mengkonsumsi makanan tersebut baik yang diproduksi dalam negeri maupun produk impor.
- 4) Perlu dikembangkan *zero tolerance* terhadap defisiensi pangan dan gizi di masyarakat. Terdapat dua faktor langsung penyebab gizi kurang pada anak balita, yaitu faktor makanan dan penyakit infeksi, di mana keduanya saling mendorong. Sebagai contoh, anak balita yang tidak mendapat cukup makanan bergizi seimbang memiliki daya tahan yang rendah terhadap penyakit sehingga mudah terserang infeksi. Sebaliknya penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dapat mengakibatkan asupan gizi tidak dapat diserap tubuh dengan baik sehingga berakibat pada gizi buruk.

Kebijakan berkaitan dengan konsumsi pangan merupakan upaya untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat terutama bagi balita (1000 hari pertama kehidupan). Merespon isu-isu disampaikan di atas maka beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut:

#### **Kebijakan dalam aspek Konsumsi Pangan di Kota Kediri**

No	Jenis Kebijakan	Indikator	OPD
1	Peningkatan kesadaran makanan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	Jumlah promosi/kampanye konsumsi B2SA	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Peningkatan kualitas makanan di kantin sekolah	Jumlah kantin sekolah yang difasilitasi P2KP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

3	Pengembangan Standarisasi dan HKI Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pemahaman dan penerapan standarisasi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume produk pengolahan hasil perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pembinaan kantin sekolah	Jumlah kantin sekolah yang dilatih dan difasilitasi penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan (P2KP) di kantin sekolah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Meningkatkan ketersediaan obat dan produk pangan sehat	Persentase produk obat dan pangan yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan
7	Sertifikasi HALAL industri rumah tangga pengolahan pangan	Jumlah Industri Rumah Tangga Pengolahan Pangan yang tersertifikasi HALAL	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
8	Pengembangan teknologi pangan olahan	Jumlah taman posyandu difasilitasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

## 2.2. Kebijakan Terkait Akses Pangan

Kebijakan berkaitan dengan akses pangan merupakan kebijakan terkait erat dengan bagaimana pangan tersedia dan terdistribusi secara merata di seluruh wilayah di Kota Kediri (jangkauan distribusi dan pemasaran) serta masyarakat memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Aspek daya beli juga merupakan faktor yang penting dalam akses pangan. Berkaitan dengan aspek ini, isu-isu yang perlu ditanggapi dalam penetapan kebijakan adalah :

- 1) Pentingnya memperhatikan pengoptimalan sumber daya yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan seperti pekarangan dalam penyediaan pangan dan gizi masyarakat.
- 2) Transformasi MDGs ke SDGs menuntut produsen untuk memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan ekonomi dan ekologi sehingga terjadi kegiatan produksi yang berkelanjutan (*sustainable production*).
- 3) SDGs juga memberi perhatian pada aspek penyuluhan yang membantu masyarakat dapat mengembangkan teknologi yang tepat spesifik lokasi dan juga pengembangan *local wisdom*.
- 4) Penciptaan nilai tambah di sektor pertanian penting untuk selalu diperhatikan dan dikembangkan terutama dalam rangka meningkatkan daya saing dalam ASEAN Economic Community (AEC).
- 5) Akses pangan cenderung rawan di daerah yang tingkat ketahanan pangan rendah. Sehingga pemerintah dan masyarakat perlu terus waspada atas dinamika perubahan daerah-daerah rawan pangan.

Mendasarkan pada isu-isu yang diuraikan di atas dan upaya pembangunan dan pengembangan akses pangan bagi seluruh masyarakat, maka kebijakan-kebijakan yang diambil Kota Kediri dengan OPD yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut:

#### **Kebijakan dalam Aspek Akses Pangan di Kota Kediri**

<b>No.</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Indikator</b>	<b>OPD</b>
1	Pengembangan jaringan irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Tingkat Kelurahan (Jitot Jides)	Dinas PUPR
2	Penanganan OPT	Jumlah petugas terlibat dalam penanganan OPT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan teknologi produksi	Jumlah unit demplot varietas baru (padi, jagung, dan kedelai)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Pengembangan produk pertanian ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kelompok tani menerapkan sistem GAP</li> <li>• Kelompok tani pengembang agen hayati</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Anti Poverty Program bidang pertanian	Pemberdayaan kelompok masyarakat petani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Peningkatan produksi pangan di Kota Kediri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi padi</li> <li>• Peningkatan produksi jagung</li> <li>• Peningkatan produksi kedelai</li> <li>• Peningkatan produksi sayur</li> <li>• Peningkatan produksi buah</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Peningkatan perikanan budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah kelompok yang terakses	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9	Peningkatan Produksi Ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi daging</li> <li>• Peningkatan produksi susu</li> <li>• Peningkatan produksi telur</li> <li>• Jumlah unit usaha yang memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Pengembangan tanaman tebu	Penggunaan bibit unggul tebu/Meningkatkan luas areal bongkar ratoon tanaman tebu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Peningkatan Bina Pasar	Jumlah pengelola pasar tradisional yang mengikuti pelatihan pengelolaan pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12	Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kelompok tani terlibat pemberdayaan</li> <li>• Jumlah tenaga penyuluh pertanian</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13	Pengembangan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok tani tanaman pangan menerapkan SLPHT</li> <li>• Kelompok tani hortikultura menerapkan SLPHT</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
14	Peningkatan kapasitas SDM peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kelompok peternak</li> <li>• Jumlah gabungan kelompok peternak</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15	Peningkatan kapasitas nelayan/petani ikan	Jumlah kelompok yang mengakses program	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

16	Peningkatan distribusi pangan masyarakat	Jumlah gapoktan difasilitasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
17	Penguatan lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18	Pengembangan kawasan mandiri pangan	Jumlah kawasan mandiri pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
19	Pengembangan pangan lestari di kawasan	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari/P2KP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
20	Pengembangan Kelurahan Karangkitri	Jumlah Kelurahan Karangkitri	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Daerah Rawan Pangan yang Ditangani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
22	Peningkatan akses pangan oleh kelompok miskin	Prosentase RTM yang memperoleh akses usaha dan pemenuhan kebutuhan pokok minimum	Dinas Sosial
23	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Calon Wirausaha Baru yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan</li> <li>• Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasarannya</li> <li>• Persentase kenaikan jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui klinik KUMKM</li> </ul>	Dinas Koperasi, UMKM, dan Naker
24	Peningkatan Promosi Industri Rumah Tangga Pengolahan Pangan	Jumlah Industri Rumah Tangga Pengolahan Pangan yang Diikutkan dalam Promosi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
25	Peningkatan bimbingan teknis pada Industri Rumah Tangga Pengolahan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Industri Rumah Tangga Pengolahan Pangan yang mendapat bimbingan teknis pengolahan</li> <li>• Jumlah Industri Rumah Tangga Pengolahan Pangan yang mendapat bimbingan teknis peningkatan daya saing</li> <li>• Jumlah Industri Rumah Tangga Pengolahan Pangan yang mendapat bimbingan teknis peningkatan kualitas produk</li> <li>• Jumlah Industri Rumah Tangga Pengolahan Pangan yang mendapat bimbingan teknis peningkatan desain kemasan</li> <li>• Fasilitasi Industri Rumah Tangga Pengolahan Pangan untuk mendapatkan merk</li> </ul>	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	Jumlah UEM yang terfasilitasi peningkatan usahanya	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan kepala keluarga dalam mengelola usaha	Jumlah peserta Pembinaan Organisasi Perempuan dalam rangka Pemberdayaan Perempuan	DP3AP2KB

### 2.3. Kebijakan Terkait Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Pelayanan kesehatan memiliki fungsi menjalankan fungsi preventif menjaga kesehatan masyarakat melalui kegiatan layanan kesehatan berupa penyuluhan dan juga kegiatan lainnya yang terkait dan juga memiliki fungsi kuratif berupa melayani masyarakat yang telah terinfeksi dan menjadi sakit untuk diambil tindakan pengobatan. Sarana dan prasarana untuk berjalannya layanan kesehatan dengan baik adalah komponen penting yang terus diupayakan peningkatan ketersediaan dan kualitasnya.

Pendidikan juga merupakan unsur penting dalam pembangunan pangan dan gizi. Transfer informasi dan aktualisasi dalam keputusan konsumsi pangan dan gizi akan menjadi lebih efektif dengan adanya pendidikan yang lebih baik di masyarakat, minimal menuntaskan masyarakat melek huruf. Beberapa kebijakan terkait dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Kediri adalah sebagai berikut :

#### **Kebijakan Dalam Aspek Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Kota Kediri**

<b>No.</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Indikator</b>	<b>OPD</b>
1	Peningkatan kesehatan bayi dan balita	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)</li><li>• Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan</li><li>• Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif</li><li>• Persentase bayi usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A</li></ul>	Dinas Kesehatan
2	Peningkatan Kesehatan Ibu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase ibu hamil mendapat asupan zat besi (Fe)</li><li>• Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC (Ante Natal Care) berkualitas</li></ul>	Dinas Kesehatan
3	Kegiatan imunisasi bagi anak-anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah kegiatan fasilitasi imunisasi yang dilakukan</li><li>• Jumlah kegiatan RCA (Rapid Convenience Self Assessment)</li><li>• Kegiatan Data Quality Self-Assessment (DQS)</li></ul>	Dinas Kesehatan
4	Peningkatan kesehatan tingkat rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase RT yang mengonsumsi garam beryodium</li><li>• Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana</li><li>• Persentase kelurahan yang melaksanakan <i>surveillance</i> gizi</li><li>• Persentase Desa Siaga (Desi) Aktif Purnama</li></ul>	Dinas Kesehatan
5	Peningkatan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase rumah tangga sehat</li><li>• Pembentukan taman Posyandu</li><li>• Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (Puri)</li><li>• Jumlah Posbindu aktif</li></ul>	Dinas Kesehatan
6	Layanan penanganan sampah	Capaian layanan persampahan perkotaan	DLHKP

7	Pengembangan sarana prasarana hidup sehat dan bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase masyarakat yang memiliki akses terhadap jamban sehat</li> <li>• Prosentase masyarakat yang memiliki akses terhadap sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan</li> </ul>	Dinas Kesehatan
8	Monitoring kesehatan masyarakat	Prosentase sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan	Dinas Kesehatan
9	Pengembangan pengelolaan air	Persen capaian layanan air minum perkotaan	PDAM
10	Penyediaan air minum	Persen capaian layanan air limbah perkotaan	DPUPR
11	Tingkat pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD sederajat</li> <li>• Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SMP sederajat</li> <li>• Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SMA sederajat</li> </ul>	Dinas Pendidikan
12	Program Pendidikan Non-Formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Melek Huruf (AMH) pada usia 15 s/d 59 tahun mencapai 93,9%</li> <li>• Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Paket A</li> <li>• Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Paket B</li> <li>• Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Paket C</li> <li>• Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan PAUD</li> </ul>	Dinas Pendidikan

#### 2.4. Kebijakan Penunjang dalam Pembangunan Pangan dan Gizi

Kebijakan penunjang lebih merupakan kebijakan yang tidak langsung berkaitan dengan pangan dan gizi tetapi menjadi wadah, proses, dan atau sarana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi di Kota Kediri. Berikut ini adalah kebijakan yang diambil untuk menunjang kebijakan sebelumnya sehingga bisa *landing smoothly* dan meningkatkan kinerja keseluruhan kebijakan pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi di Kota Kediri:

#### **Kebijakan Penunjang Pembangunan dan Pengembangan Pangan dan Gizi di Kota Kediri**

No	Kebijakan	Indikator	OPD
1	Peningkatan koordinasi melalui pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dalam setahun	Frekuensi pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dalam setahun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pemberdayaan penyuluh pertanian/perikanan/kehutanan	Jumlah penyuluh bersertifikat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Peningkatan pembinaan tim SKPG	Jumlah SKPG kelurahan yang dibina	Dinas Kesehatan

4	Kegiatan Orientasi Kader Taman Posyandu tentang Perlindungan Anak	Jumlah peserta Orientasi Kader Taman Posyandu tentang Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan
---	---	---	-----------------

## 2.5. Kebijakan Lintas Sektor (Intervensi pesifik Gizi)

Pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi yang tertuang dalam dokumen RAD-PG Kota Kediri ini melibatkan banyak sektor (*multisector approach*). Sinergisme program dalam satu misi yaitu pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi di Kota Kediri membuka peluang untuk meningkatnya kinerja program masing-masing SKPD maupun kinerja keseluruhan tim multisektor pangan dan gizi di Kota Kediri.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait lainnya yang terlibat dan memiliki peran dalam pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi masyarakat Kota Kediri adalah:

- 1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 2) Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
- 3) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 4) Dinas Kesehatan
- 5) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
- 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 7) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 8) Dinas Pendidikan
- 9) Dinas Sosial
- 10) DP3AP2KB
- 11) PDAM
- 12) Barenlitbang

## B. Rencana Aksi Multisektor

### 1. Outcome Utama, Output, dan Intervensi

Sinergisme program antar sektor di Kota Kediri diharapkan dapat mencapai sasaran berikut ini. Indikator outcome, output, dan juga indikator proses dapat disajikan sebagai berikut:

#### **Program, Indikator Output, Outcome, dan Impact**

<b>Input (Program)</b>	<b>Output</b>	<b>Outcome</b>	<b>Impact</b>
<b>Pilar I. Peningkatan Gizi Masyarakat</b>			
Peningkatan kesehatan bayi dan balita	Prevalensi balita kurus	Balita Gizi Kurang	Angka kematian bayi
	Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Balita Gizi Buruk	Harapan Hidup
	Akses UCI (Universal Child Immunization)	Balita Stunting	
	ASI Eksklusif untuk bayi	AKB (/1000 kelahiran	

	0-6 bln	hidup)	
Peningkatan kesehatan ibu	Pelayanan kesehatan ibu hamil dan menyusui	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Angka Kematian Ibu
Peningkatan kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan sekolah	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	Harapan Hidup
<b>Pilar II. Peningkatan Aksesibilitas dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan</b>			
Peningkatan ketersediaan dan kemandirian pangan	Produksi Padi Produksi Jagung Produksi Gula Produksi Kedelai Produksi Telur Produksi Ikan Produksi Daging	Ketersediaan Energi  Ketersediaan Protein	Kemandirian Pangan
Peningkatan aksesibilitas dan penganekaragaman pangan	Jumlah Kelurahan Rawan Pangan Tingkat Konsumsi Pangan Tingkat Konsumsi Ikan Tingkat Konsumsi Pangan Hewani Konsumsi Beras Konsumsi Sayur dan Buah Konsumsi Pangan Hewani	Jumlah Masyarakat Rawan Pangan Angka Kecukupan Energi Angka Kecukupan Protein  Pola Pangan Harapan	Kualitas dan konsumsi pangan
<b>Pilar III. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan</b>			
Pengawasan mutu dan keamanan pangan	Proporsi makanan yang memenuhi syarat keamanan pangan Presentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan (memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi) Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan Tim terpadu pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan Tingkat Keamanan Pangan (%)	Kualitas dan keamanan pangan	Kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakat
Penciptaan nilai tambah dan pengembangan bisnis pangan	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dibangun dalam memproduksi makanan yang aman, bermutu, dan bergizi Presentase produk makanan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	Berkembangnya industri pangan	Peningkatan pendapatan
<b>Pilar IV. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</b>			
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen rumah tangga yang telah menerapkan PHBS	Kebersihan lingkungan dan gaya hidup yang sehat di Provinsi	Kesehatan Masyarakat Meningkat
<b>Pilar V. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi</b>			
Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi	Frekuensi pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dalam setahun yang dihadiri Walikota Persen kecamatan memiliki Tim Pangan Kecamatan MANDIRI Jumlah SKPG Kabupaten/Kota yang aktif	Meningkatkan kapasitas dan kualitas koordinasi lintas sektor	Ketahanan pangan dan gizi masyarakat

## 2. Target Capaian RAD-PG Kota Kediri

Target Capaian RAD-PG Kota Kediri sebagai berikut :

	Indikator	Satuan	Tahun Dasar (2017)	2018	2019
<b>Pilar I. Peningkatan Gizi Masyarakat</b>					

	Indikator	Satuan	Tahun Dasar (2017)	2018	2019
1.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	<15	<15	<15
2.	Balita Gizi Buruk	%	<3	<3	<3
3.	Balita Stunting	%	<30	<30	<30
4.	Angka Kematian bayi B (/1000 kelahiran hidup)	/1000			
5.	Prevalensi ASI Eksklusif	%	44	47	50
6.	Prevalensi Anemia ibu hamil	%	20	20	20
7.	Angka kelahiran hidup (1/100.000 Kelahiran Hidup)	/1000	4298	4266	4240
8.	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun	%	15,4	15,4	15,4
9.	Akses UCI (Universal Child Immunization)	% Desa/Kel	92	92,5	93
10.	Prevalensi Balita Kurus	%	<15	<15	<15
11.	Berat Badan Lahir Rendah	%			
12.	Ibu Hamil KEK	%	2,2	<20	<20
<b>Pilar II. Peningkatan Aksesibilitas dan Penganekaragaman</b>					
1.	Ketersediaan Energi	KKal/kap/hari	2581	2521	2460
2.	Ketersediaan Protein	Gr/kap/hari	-	-	-
3.	Produksi Padi	Ton	12.290	13.205	13.213
4.	Produksi Jagung	Ton	7.457	4.673	4.678
5.	Produksi Kedelai	Ton	30	14,4	16
6.	Produksi Gula	Ton	141000	141300	14500
7.	Produksi Daging Sapi	Ton	3.444	3.531	3.621
8.	Produksi Ikan	Ton	154,872	157,969	160,529
9.	Produksi Garam	Ton	-	-	-
10.	Angka Kecukupan Energi	Kkal/kap/hari	1.869,3	1.934,6	1.967,3
11.	Angka Kecukupan Protein	Gr/kap/hari	19,9	21,2	22,6
12.	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kap/tahun	24	27,20	30,82
13.	Pola Pangan Harapan	Skor PPH	87,50	87,80	88,00
14.	Kerawanan pangan masyarakat	% RTG	8,25	100	-
15.	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	16	16	16
<b>Pilar III. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan</b>					
1	Proporsi makanan yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	89,1	89,6	90,1
2	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan (memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi)	%	87	88	89
3	Persentase industry pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	%	5	6	7
4	Tim terpadu pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan	% kelurahan	15,79	15,79	15,79

	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun Dasar (2017)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
5	Tingkat keamanan pangan (%)	%	82	83	84
6	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dibina dalam memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi	Unit	80	90	100
7	Persentase produk makanan olahan industry rumah tangga pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	%	75	77	80
<b>Pilar IV. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)</b>					
1	Persen rumah tangga yang telah menerapkan PHBS	%	56	59	62
<b>Pilar V. Penguatan kelembagaan pangan dan Gizi</b>					
1	Frekuensi pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dalam setahun	kali/th	4	5	5
2	Jumlah SKPG Kabupaten/Kota yang aktif	%	100	100	100
3	Frekuensi pertemuan koordinasi terkait penanganan gizi masyarakat	kali/th	6	6	6

### 3. Prinsip dan Pendekatan Kunci

Dokumen rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Kediri merupakan dokumen penting yang berisi sinkronisasi program lintas sektor dan memberikan peluang besar bagi koordinasi dan peningkatan efektivitas program pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi di Kota Kediri. Selain hal tersebut, dokumen ini memberikan indikasi pendanaan definitif yang sekaligus memberikan gambaran seberapa besar suatu kegiatan ditunjang oleh *budget* dari APBD maupun APBN. Rencana Aksi pangan dan gizi yang disusun merupakan sinergis dengan rencana strategis masing-masing SKPD dan juga dengan RPJMD Kota Kediri.

RPJMD Kota Kediri sebagai arahan pembangunan Kota Kediri 5 tahun ke depan secara eksplisit menyatakan bahwa Kota Kediri harus melakukan kesinambungan pembangunan dengan mengakomodasikan secara dinamis perubahan-perubahan sehingga dapat mencapai Visi pembangunan yaitu:

*“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”*

Komponen terbesar dan terpenting tidak dapat dipungkiri adalah kemampuan dan kapasitas SDM. Dan telah banyak terbukti secara empiris bahwa aspek kesehatan dan pangan berkualitas, bergizi, dan berimbang

adalah komponen penting bagi pengembangan SDM. Gizi yang baik dan kesehatan yang terjaga berkontribusi besar bagi peningkatan kapasitas dan produktifitas SDM. Sehingga, RAD PG ini menjadi bagian tak terpisahkan untuk pencapaian Visi Kota Kediri.

Beberapa prinsip penting yang dikembangkan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kota Kediri adalah:

a) Pendekatan Multisektor

Prinsip ini memang menjadi dasar penyusunan RAD-PG Kota Kediri dan dokumen RAN-PG yang akan disusun pula di tingkat nasional. Pendekatan multisektor merupakan upaya pencapaian *Pareto Optimum* suatu program yang akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat khususnya di Kota Kediri.

b) *Effective Collaboration*

Terdapat 5 tingkatan penting menuju kolaborasi yang efektif yaitu *Coexistence, Cooperation, Coordination*, dan akhirnya *Collaboration*. Pada tahap awal, tahapan memerlukan presisi tentang *what is done* dan *who will do it*. *Cooperation* memiliki inti *sharing* informasi dan pengenalan benefit melakukan *partnership working* dalam hal ini untuk peningkatan pangan dan gizi di Kota Kediri. *Coordination* adalah perencanaan bersama, kemudian melakukan *sharing* tanggungjawab dan juga peran. *Collaboration* adalah *longterm partnership* yang merupakan kombinasi antara komitmen, *management*, kontribusi, dan *achieving the goals*, yaitu peningkatan pangan dan gizi di Kota Kediri.

c) *Active Participation*

Sebagaimana disampaikan di atas, wujud kolaborasi merupakan resultan beberapa aspek dalam rangka pembangunan pangan dan gizi di Kota Kediri. Semuanya tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi aktif dari keseluruhan pihak yang terlibat. Sehingga prinsip ini menjadi dasar utama setiap tahap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi di Kota Kediri.

d) Sensitif Gender

Isu penting tentang gender di sini adalah bagaimana keluarga sebagai entitas terkecil masyarakat mampu membangun sebuah sinergisme antara pihak wanita dan pria untuk berperan aktif secara bersama-sama dalam pembangunan pangan dan gizi keluarga. Dan tidak dapat dipungkiri memang ibu rumah tanggalah yang merupakan pengambil keputusan utama dalam

konsumsi pangan, sehingga pembinaan dan pemberian informasi yang cukup untuk pangan yang sehat menjadi sangat penting dilakukan. Selain itu, stereotip bahwa pangan dan pola hidup sehat menjadi urusan perempuan atau ibu rumah tangga saja harus diubah di masyarakat dan hal itu merupakan *concern* bersama kedua belah pihak. Sehingga konsumsi makanan sehat, bergizi, dan berimbang adalah komitmen bersama dalam keluarga.

e) *Sustainability* (keberlanjutan)

Pembangunan pangan dan gizi bagi masyarakat adalah upaya yang terus menerus, terpadu, dan berperspektif ke depan dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan pola hidup dan konsumsi di masyarakat. Kebijakan pemerintah memberikan kejelasan arah, regulasi, dan fasilitasi yang memudahkan pelaksana menjalankan tugas dan fungsinya, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas gagasan program dan pelaksanaannya. Berjalannya manajemen ini akan melahirkan *continuous improvement* di dalam pembangunan pangan dan gizi di Kota Kediri.

C. Kerangka Pelaksanaan

1. Kerangka Kelembagaan

Prinsip pelaksanaan RAD-PG di Kota Kediri adalah *collaborative actions* dari lembaga-lembaga dalam rangka pendekatan multisektor. Beberapa kelembagaan dan perannya dapat disampaikan sebagai berikut ini:

**Kelembagaan dan perannya dalam pelaksanaan RAD-PG Kota Kediri**

<b>Lembaga</b>	<b>Peran</b>
Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan kampanye 1000 HPK, ASI eksklusif dan pedoman gizi seimbang, serta pemantauan berat badan pada anak dan remaja</li> <li>2. Pelatihan tenaga kesehatan dan kader posyandu tentang 1000 HPK, tumbuh kembang anak, status gizi prahamil dan saat hamil, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif.</li> <li>3. Edukasi gizi saat pemeriksaan ANC</li> <li>4. Penyebaran media KIE gizi di fasilitas kesehatan dan sekolah (melibatkan kominfo)</li> <li>5. Pelatihan pemberian makan balita</li> <li>6. Intensifikasi penggunaan informasi yang ada pada kartu menuju sehat</li> <li>7. Standarisasi pengetahuan gizi bagi tenaga gizi</li> <li>8. Suplementasi tablet besi-folat/MMS bagi ibu hamil dan remaja putri</li> <li>9. Suplementasi vitamin A pada anak</li> <li>10. Fortifikasi garam beryodium</li> <li>11. PMT pada ibu KEK</li> <li>12. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui penimbangan di posyandu dan pengisian kartu menuju sehat</li> <li>13. Surveilans dan skrining gizi</li> <li>14. Melakukan penatalaksanaan kasus gizi buruk akut.</li> <li>15. Peningkatan cakupan Peserta JKN Kesehatan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)</li> <li>17. Edukasi penerapan PHBS (terutama penggunaan jamban sehat dan penggunaan air bersih)</li> <li>18. Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal</li> <li>19. Imunisasi dasar lengkap bagi bayi dan anak</li> <li>20. Peningkatan sanitasi</li> <li>21. Memasyarakatkan olahraga dengan promosi, edukasi dan dukungan untuk melakukan aktivitas fisik yang cukup sehingga mencapai keseimbangan energi.</li> </ol>
Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivasi program UKS</li> <li>2. Edukasi dan promosi terkait jajanan sehat</li> <li>3. Pembenahan kantin sekolah dan aturan terkait jajan di luar sekolah</li> <li>4. Menggalakkan kembali program kebun sekolah</li> <li>5. Wajib belajar 12 tahun</li> <li>6. Pelatihan gizi dan tumbuh kembang anak bagi guru</li> <li>7. Program kecakapan hidup perempuan dan keayahbundaan</li> </ol>
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan kampanye dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan sehingga terjadi diversifikasi konsumsi pangan</li> <li>2. Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal</li> <li>3. Mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal</li> <li>4. Aktivasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi</li> <li>5. Model kawasan mandiri pangan</li> <li>6. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi</li> <li>7. Sosialisasi model lumbung pangan masyarakat</li> <li>8. Pemantauan distribusi, harga, dan cadangan pangan</li> <li>9. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, diantaranya melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari</li> <li>10. Promosi dan kampanye terkait diversifikasi pangan</li> <li>11. Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan</li> <li>12. Diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal</li> <li>13. Penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan yang baik dan ramah lingkungan</li> <li>14. Peningkatan luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman perkebunan</li> <li>15. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan</li> <li>16. Peningkatan kualitas hasil produksi perkebunan</li> <li>17. Peningkatan nilai tambah hasil tanaman perkebunan</li> <li>18. Penanganan pemasaran</li> <li>19. Pembinaan kelompok tani</li> <li>20. Peningkatan produksi ikan budidaya</li> <li>21. Pembinaan peningkatan kapasitas peternak</li> </ol>
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin ketersediaan pangan di pasar</li> <li>2. Memantau stabilitas harga bahan pangan</li> <li>3. Melakukan operasi pasar</li> <li>4. Dukungan terhadap industri pangan dan makanan</li> <li>5. Regulasi terkait fortifikasi</li> <li>6. Pembinaan dan pengembangan industri makanan dan minuman</li> <li>7. Standarisasi kualitas produk makanan dan minuman</li> </ol>
Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan program pembinaan usaha ekonomi produktif</li> </ol>
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan wirausaha baru</li> <li>2. Peningkatan teknologi KUMKM</li> <li>3. Pembinaan pemasaran KUMKM</li> </ol>
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan layanan limbah perkotaan</li> </ol>
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan layanan pengelolaan sampah perkotaan</li> </ol>
DP3APPKB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas ber-KB</li> <li>2. Pembinaan keluarga sejahtera</li> <li>3. Mengkampanyekan usia kehamilan &gt;18 tahun</li> </ol>
PDAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan layanan pengelolaan air minum perkotaan</li> </ol>

## 2. Strategi Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas memiliki dimensi program dan dimensi kelembagaan. Keduanya bermuara pada kemampuan untuk mencapai output kegiatan secara efektif dan mampu menghasilkan dinamika konstruktif pembangunan pangan dan gizi di Kota Kediri.

Pembangunan kapasitas dari dimensi program menunjukkan seberapa strategis isu yang ditanggapi dengan program disusun. Program yang dialamatkan pada isu yang sangat strategis akan menyembuhkan akar permasalahan dan akhirnya membawa perubahan yang signifikan dan bahkan dinamika konstruktif yang terjadi sebagai eksternalitas positif suatu program akan bergulir dalam *long-run*. Ini akhirnya akan membawa multiplier yang besar dalam pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi di suatu wilayah.

Berdasarkan program yang telah dijalankan, suatu program misalnya telah berlangsung dalam waktu lama namun memiliki efek yang kurang optimal bagi perubahan positif perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Perilaku mengoptimalkan sumberdaya adalah *advanced behavior* yang dengan didukung oleh informasi, pengetahuan operasional, dan juga komitmen dengan menganggap bahwa memanfaatkan sumberdaya memiliki oportunitas yang tinggi maka hal itu akan dapat dijalankan. Jika tidak ada persepsi dan respons yang berasal dari internal masyarakat maka apa yang dilakukan masyarakat hanya 'meramalkan' program pemerintah tanpa dapat menumbuhkan motivasi akan pentingnya hal itu dilakukan.

Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi memang harus 'membali' berangkat dari realitas (data yang akurat) dan kemudian program disusun dengan prinsip partisipatif dengan menumbuhkan modal sosial di masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kepercayaan masyarakat kepada program-program dan niat baik pemerintah dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas pangan dan gizi masyarakat.

Peningkatan kapasitas dalam dimensi kelembagaan memiliki simpul pada *social capital* seluruh agen yang terlibat, baik pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan kapasitas lembaga memiliki ciri adanya peningkatan kemampuan melakukan *coexistence*, *cooperation*, *coordination*, dan akhirnya *collaboration*. Dengan melakukan *partnership* atau sinkronisasi program/kegiatan ini maka kapasitas dan kekuatan

program untuk menjawab permasalahan yang ada semakin meningkat dan ini berarti juga benefit yang bertambah besar pada masyarakat.

### 3. Pendanaan Indikatif

Berdasarkan program/kegiatan yang telah tersusun sumber pendanaan sebagian besar adalah dari alokasi dana Pemerintah Kota Kediri (APBD Kota Kediri). Jumlah dana pada masing-masing SKPD dan program yang terkait disajikan dalam Matriks Rencana Aksi.

### 4. Struktur Organisasi RAD-PG Kota Kediri

Susunan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Kediri akan dijabarkan dalam lampiran yang menjadi satu bagian dari Lampiran Peraturan Walikota ini.

## D. Pemantauan dan Evaluasi

### 1. Indikator-indikator yang Dipantau

Pelaksanaan RAD-PG dilakukan oleh berbagai instansi yang terkait dengan pangan dan gizi. Instansi tersebut memiliki berbagai kegiatan yang dapat menunjang kegiatan pelaksanaan RAD-PG. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi-instansi tersebut dipantau pelaksanaannya agar sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan. Indikator yang dipantau dalam RAD-PG Kota Kediri merupakan indikator kegiatan sebagai mana tabel berikut:

**Indikator RAD-PG Kota Kediri yang Dipantau**

Kegiatan	Indikator	Pelaksana
<b>Pilar I. Peningkatan Gizi Masyarakat Indikator Proses - Aspek Kesehatan</b>		
Peningkatan kesehatan bayi dan balita	Persentase balita ditimbang berat badannya (WS) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif Persentase 6-59 bulan dpt kapsul vitamin A	Dinkes
Peningkatan kesehatan ibu	Persentase ibu hamil mendapat Fe Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC (Ante Natal Care) berkualitas	Dinkes

Terdapat 12 lembaga di Kota Kediri yang terlibat dalam rencana aksi daerah pangan dan gizi ini. Masing-masing dengan program yang dimilikinya terlibat aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi di Kediri. Penganggaran dari APBD Kota Kediri juga disampaikan dalam dokumen ini sebagai bukti komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan pangan dan gizi masyarakat.

## 2. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan

Waktu pemantauan dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun dibagi dalam dua periode yakni di awal dan pertengahan pelaksanaan program melalui koordinasi yang difasilitasi oleh Barenlitbang Kota Kediri. Dua tahapan koordinasi ini selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

### a. Pemantauan Awal Pelaksanaan Program

- 1) Mengkonfirmasi kondisi yang tertulis di dalam RAD-PG dengan kondisi riil di lapangan;
- 2) Penentuan dan kesepakatan indikator kinerja pelaksanaan RAD-PG;
- 3) Memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 4) Memberikan penjelasan pada pihak terkait mengenai mekanisme kerja implementasi RAD-PG.

### b. Pemantauan Pertengahan Pelaksanaan Program

- 1) Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RAD-PG pada pertengahan implementasi melalui OPD terkait dan para stakeholders;
- 2) Melihat arah pengembangan pelaksanaan RAD-PG apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai;
- 3) Menggali kemungkinan keberlangsungan hasil pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai.

## 3. Pelaporan Hasil Pemantauan

Pelaporan dan kegiatan monev dilakukan secara periodik di setiap tahunnya. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing SKPD dan lembaga terkait berkaitan dengan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan realisasinya.

## 4. Indikator-indikator yang Dievaluasi

Indikator yang dievaluasi adalah indikator capaian RAD-PG Kota Kediri. Indikator tersebut diuraikan sebagai berikut :

### *Peningkatan Gizi Masyarakat*

- a) Prevalensi Balita Gizi Kurang
- b) Balita Gizi Buruk
- c) Balita Stunting
- d) Angka Kematian bayi (/1000 kelahiran hidup)
- e) Prevalensi ASI Eksklusif
- f) Prevalensi Anemia Ibu Hamil
- g) Angka kelahiran hidup (1/100.000 Kelahiran Hidup)

- h) Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun
- i) Akses UCI (*Universal Child Immunization*)
- j) Prevalensi Balita Kurus
- k) Berat Badan Lahir Rendah

*Peningkatan Aksesibilitas dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan*

- a) Ketersediaan Energi
- b) Ketersediaan Protein
- c) Produksi Padi
- d) Produksi Jagung
- e) Produksi Kedelai
- f) Produksi Gula
- g) Produksi Daging Sapi
- h) Produksi Ikan
- i) Produksi Garam
- j) Angka Kecukupan Energi
- k) Angka Kecukupan Protein
- l) Tingkat Konsumsi Ikan
- m) Pola Pangan Harapan
- n) Kerawanan Pangan Masyarakat
- o) Jumlah Desa Rawan Pangan

*Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan*

- a) Proporsi makanan yang memenuhi syarat keamanan pangan
- b) Tingkat Keamanan Pangan (%)

*Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*

- a) Persen rumah tangga yang telah menerapkan PHBS

*Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi*

- a) Frekuensi pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dalam setahun
- b) Jumlah SKPG yang aktif

5. Waktu dan Pelaksanaan Evaluasi

Waktu evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali pada akhir pelaksanaan program melalui koordinasi yang difasilitasi oleh Barenlitbang. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator target capaian RAD-PG setiap akhir periode sehingga keberhasilan pencapaian target setiap tahun dapat dinilai.

6. Pelaporan Hasil Evaluasi

Evaluasi Akhir Pelaksanaan Program dilaporkan dalam kegiatan koordinasi dengan dengan SKPD terkait untuk:

- a. Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RAD-PG pada akhir implementasi;
- b. Mengidentifikasi arah pengembangan selanjutnya di SKPD terkait;
- c. Menggali informasi;
- d. Melihat usaha-usaha dalam rangka menjaga keberlangsungan hasil pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai oleh SKPD terkait.

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003